

SARAN DAN REKOMENDASI

- Menyusun kebijakan penelusuran selisih, perbaikan dan penatausahaan aset tetap
- Inventarisasi dan pengamanan aset tetap tanah dan bangunan
- Evaluasi penatausahaan dan penyajian aset tetap yang belum memadai;
- Evaluasi pengelolaan tanah dan bangunan di Kemenristekdikti, antara lain:
 - ❖ Penatausahaan aset tanah pada satker-satker Kemenristekdikti;
 - ❖ Inventarisasi aset tanah pada PTN yang dalam proses sengketa atau dalam permasalahan hukum;
 - ❖ Inventarisasi aset tanah dan rumah dinas yang masih dikuasai pihak lain.

Contoh temuan hasil Audit Itjen Kemenristekdikti

1. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan BMN:

- Belum ada penetapan status penggunaan aset tetap tanah seluas 106.435 M2 senilai Rp62.988.233.000,00, gedung seluas 7.402,25 M2 senilai Rp14.306.542.756,00, peralatan dan mesin senilai Rp8.768.421.036,00.
- Terdapat bangunan mangkrak yang di atas aset tetap tanah yang tidak dapat dimanfaatkan.
- Terdapat 501 (lima ratus satu) unit Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp3.262.122.500,00 dalam keadaan tidak dimanfaatkan dikarenakan rusak berat, belum diajukan untuk dihapuskan kepada Pengelola Barang.

2. Kepemilikan Aset tidak/belum didukung bukti yang sah:

Peralatan dan mesin berupa 9 (sembilan) kendaraan bermotor masih dengan nama Yayasan dan belum dilakukan balik nama.

3. Perencanaan kegiatan tidak memadai:

Barang-barang hasil pengadaan tahun 2016 belum dimanfaatkan.

4. Penetapan/Pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan:

Terdapat aset tetap tanah yang masih digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat tanpa didukung oleh perjanjian tertulis.

5.Kelemahan pengelolaan fisik aset:

- Kepemilikan dengan bukti sertifikat terhadap aset tetap tanah belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, misalnya Sertifikat kepemilikan belum atas nama Pemerintah RI cq Kemenristekdikti.
- Aset tetap tanah belum dilengkapi dengan tanda batas bidang tanah secara permanen dan belum memberikan papan nama sebagai tanda kepemilikan.

6.Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu Prosedur atau keseluruhan prosedur:

Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum diusulkan pengesahan/persetujuannya kepada Kementerian Keuangan.

7. Penerimaan Negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah:

Terdapat penerimaan negara dari pemanfaatan aset tanah, bangunan dan kendaraan sedikitnya Rp37.632.000,00 yang belum dipungut dan disetor ke kas negara.

8. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara):

Aset berupa gedung dan bangunan seluas 3.696,50 m² belum semuanya memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

9. Proses Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan:

•Belum ada pencatatan aset tetap setidaknya senilai Rp18.643.761.072,00 yang terdiri atas tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin ke dalam Laporan Keuangan TA 2015, Laporan Keuangan Semester I dan II TA 2016 dan SIMAK BMN

lanjutan

- Pelaporan aset tetap - mesin dan peralatan belum seluruhnya tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan penyajian aset lainnya dalam laporan keuangan belum sesuai dengan bagan akun standar.
- Hibah langsung aset tetap - peralatan pendukung perkuliahan yang diserahterimakan dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi belum diinput dalam SIMAK-BMN dan belum disajikan dalam neraca per 31 Desember 2015.
- Aset tetap - gedung dan bangunan, dan kendaraan bermotor yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan belum semua didukung dengan dokumentasi BMN

Terima kasih

Contact:
dadit@ristekdikti.go.id

